



BULETIN

LLDIKTI WILAYAH IV

Volume 20 No. 1 - 1 April 2020

**OPTIMALISASI PERAN DAN FUNGSI
DOSEN PNS DPK**

KEMITRAAN DENGAN DUNIA INDUSTRI

**PROFIL AKREDITASI PERGURUAN TINGGI
DAN PROGRAM STUDI DI LLDIKTI 4**

WWW.LLDIKTI4.OR.ID

ISSN 1979-5203

TIM REDAKSI

PELINDUNG

Kepala LLDIKTI Wilayah IV
Prof. Dr. Uman Suherman AS., M.Pd.

Penyunting

Sekretaris LLDIKTI IV

Ir. Dhanita Chandra, M.Si

Kepala Bagian Umum

Entin Hartini, S.Sos., M.Si

Kepala Bag Tata Usaha dan BMN

Sobar, S.H

Redaktur

Prof. Dr. Hj. Atie Rachmatie, M.Si

Redaktur Pelaksana

Dr. Anne Maryani, M.Si

Dr. Manap Solihat, M.Si

Drs. Ade Nedi Supardi, M.I.Kom

Entin Hartini, Sos.,M.Si

Drs. Wahyudin Tahedi, M.Si

Hevy Pratiwi, S.I.Kom

Fotografer

Idik Nursidik, S.T

Novian Hari Setiyoadi, S.Kom

Desain Grafis

Donny Ginanjar

Andri Budi Santoso

Alamat Redaksi

Hubungan Masyarakat

LLDIKTI Wilayah IV

Informasi@lldikti4.or.id

Jl. P. H.H. Mustafa No. 38 Bandung 40124

Nomor ISSN : 1979-5203

DAFTAR ISI

INFO LLDIKTI

Optimalisasi Peran dan Fungsi Dosen Dpk Pns di PTS



INFO LLDIKTI

Kemitraan Dengan Dunia industri



INFO PTS

13 kiprah Unisba di Masa
Pandemi Covid 19

INFO PTS

16 Unikom Menerapkan
Work From Home

BULETIN APRIL 2020



Redaktur
Prof. Dr. Hj. Atie Rachmatie, M.Si.

Amazing...!!..Luar biasa...!!..nampaknya akan menjadi catatan sejarah yang panjang untuk menggambarkan suasana saat ini, April 2020. Kehadiran Covid 19, menjadikan kehidupan kita berubah drastis, di seluruh dunia dan dalam berbagai sektor kehidupan. Betapa tidak penyebaran virus

yang mematikan ini, membuat kita suka atau tidak suka harus *Stay At Home* atau *Work From Home*, termasuk dalam lingkup aktivitas perguruan tinggi. Namun ditengah-tengah keprihatinan kita semua, *the show must go on*, kita harus beradaptasi agar semua fungsi dan tugas kita dapat dijalankan dengan sebaik mungkin dengan segala keterbatasannya... dan Puji syukur kepada Maha pencipta.. Allah SWT, atas kemurahan-Nya sehingga bisa menggerakkan kami untuk menyusun Buletin periode April 2020 ini dengan lancar.

Dalam rangka menjalankan fungsi komunikasi dan informasi dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi wilayah IV, buletin ini biasanya mengumpulkan informasi, fakta dan data melalui wawancara tatap muka dengan perguruan tinggi swasta yang dianggap memiliki *News Value* untuk diekspos, namun kembali kami tidak bisa melakukannya karena pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau di luar negeri dikenal dengan istilah "*Lockdown*" walaupun tidak sama. Buletin ini harus tetap hadir di hadapan

pembaca yang mulia, dengan informasi yang dihimpun melalui komunikasi digital seperti, *Video conference, WhatsApp, E-mail, Zoom meeting, Webinar, Skype* dll. Semoga ini tidak mengurangi makna akan kemanfaatan kehadiran bulletin ini dan semoga juga menjadi catatan ibadah kepada Allah SWT, Amin Yaa Robbal Alamin.

Sidang pembaca yang terhormat, laporan utama kali ini menyajikan tema yang cukup kekinian, yaitu gagasan yang diangkat oleh "Mas Menteri", Nadiem Makarim Kemendikbud yaitu tentang "Merdeka Belajar, Kampus Merdeka". Ketika wawancara dilakukan dengan Kepala LLDIKTI Wilayah IV, peraturan menteri sudah terbit dan siap diimplementasikan. Namun dengan merebaknya penyebaran Covid 19, nampak semua lembaga pemerintah dan seluruh pihak menjadi beralih fokus perhatiannya kepada penanganan Covid 19 yang terus memakan korban, ratusan orang dari hari ke hari. Sebagai sebuah gagasan yang cukup revolusioner dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, sudah tentu kebijakan kementerian ini harus "*di-breakdown*", oleh LLDIKTI wilayah IV sebagai kepanjangan tangan pusat, seperti LLDIKTI lainnya se Indonesia. Oleh karena itu, gagasan aktual ini tetap kami angkat sebagai laporan utama, semoga berkenan.

Sidang Pembaca yang mulia,

Semoga kehadiran kami sebagai media komunikasi dan informasi tetap dapat bermanfaat. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat.

Sebagai kata penutup, kami senantiasa membuka diri untuk menerima berbagai aktivitas dalam bentuk informasi seputar kampus masing-masing, untuk berbagi dengan sesama PTS di Jawa Barat dan Banten. Selamat membaca! (ARS)

OPTIMALISASI PERAN DAN FUNGSI DOSEN DPK-PNS DI PTS



Setiap tanggal 17 tiap bulan, dalam upacara kesadaran nasional seringkali prof. Dr. Uman Suherman Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV, menghimbau agar dosen PNS yang dipekerjakan di PTS-PTS harus menunjukkan semangat membina di PTS dimana mereka ditempatkan. Bahkan idealnya, PNS-DPK harus menunjukkan keteladannya dengan aktif menjalankan tridharma perguruan tinggi, sehingga menjadi “rujukan” atau tempat konsultasi bagi dosen lainnya. Harapan ideal ini, ternyata tidak selalu berjalan mulus, karena terdapat berbagai kendala. Untuk itu beberapa waktu yang lalu, kepala LLDIKTI

wilayah IV melalui Video conference, mengundang sebanyak 797 orang dosen PNS-DPK dalam forum diskusi. Ditinjau dari jabatan akademik dosen PNS-DPK nampak masih ada yang belum memperoleh jabatan akademik yaitu sebanyak 0,37%, padahal pengangkatan terakhir ada 2-3 tahun ke belakang, yang seharusnya dalam kurun waktu satu tahun semua dosen yang diangkat, setelah pra jabatan bisa mengajukan jabatan akademik dengan kredit point yang sangat kecil (10 kum). Selanjutnya terdapat 77 orang atau setara dengan 9,66% dosen yang masih asisten ahli dengan masa jabatan yang bervariasi, bahkan ada yang sudah di atas 10 tahun tapi masih

asisten ahli. Dosen PNS-DPK yang memiliki jabatan akademik lektor ada sekitar 42%, lektor kepala sekitar 43% dan hanya ada sekitar 6% saja yang sudah guru besar. Idealnya kalau dari 465 PTS saja memiliki 1 orang guru besar, jadi minimal LLDIKTI wilayah IV harusnya punya 465 orang guru besar, demikian Prof. Dr. Uman menyatakan hitungannya secara sederhana. Berikut data dosen PNS DPK yang berada di PTS Jawa Barat dan Banten.

DATA DOSEN PNS DPK BERDASARKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN

TENAGA PENGAJAR	3 ORANG
ASISTEN AHLI	77 ORANG
LEKTOR	329 ORANG
LEKTOR KEPALA	341 ORANG
GURU BESAR	47 ORANG

Berdasarkan data di atas dosen PNS-DPK ini ternyata menyimpan berbagai permasalahan, yang sudah tentu hal tersebut mengganggu kinerja kelembagaan karena terkait dengan tidak tunainya kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para dosen tersebut. Untuk itu kepala LLDIKTI wilayah IV menggambarkan, ketersendatan dosen dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam tabel berikut :

DATA DOSEN PNS DPK	
TIDAK MELAKSANAKAN PENELITIAN DALAM SASARAN KINERJA PEGAWAI	226 ORANG
BELUM MEMILIKI SERTIFIKASI DOSEN	19 ORANG
SEDANG STUDI LANJUT	34 ORANG

Hasil temuan LLDIKTI Wilayah IV berdasarkan kinerja rutin dosen PNS-DPK yang dilaporkan dalam kinerja tiap semester secara *online* (BKD) ternyata dari 279 orang, ada 81% dosen yang tidak melaksanakan penelitian dalam

sasaran kinerja pegawai, dan 6,8% yang belum memiliki sertifikasi dosen, sedangkan yang sedang melanjutkan studi ada sekitar 12,2% saja. Di balik angka-angka ini sudah tentu ada faktor-faktor internal pada dosen yang bersangkutan maupun faktor eksternal di PTS dan lingkungan dia bekerja. Kita ketahui bahwa bagi sebagian orang melakukan riset atau penelitian dianggap suatu “barang mewah” yang sulit untuk dijalankan semua dosen. Padahal sumber daya dan peluang riset selalu tersedia, selama dosen tersebut mampu dan kreatif untuk menemukannya. Kemenristek dan Badan Riset Inovasi Nasional (kemenristek & BRIN) setiap tahun nya memberikan hibah berbagai skema dana penelitian, mulai dari dana untuk dosen pemula, sampai dana hibah LPDP yang milyaran rupiah. Disamping itu PTS umumnya menyediakan sumber dana untuk penelitian dengan variasi yang berbeda, tergantung kemampuan dan komitmen masing-masing pimpinan/Yayasan dari PTS tersebut.

Biasanya secara internal dosen terkendala juga dengan beban mengajar dan membimbing mahasiswa yang terlalu banyak, sehingga kehabisan waktu dan tenaga untuk melakukan riset. Untuk itulah pemerintah melalui UU Nomor 14 TAHUN 2005 (Pasal 72) menetapkan beban tridharma antara 12-16 SKS dalam bentuk : merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.

Pelaksanaan tridharma perguruan tinggi tersebut disesuaikan dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan:

1. Beban kerja pendidikan dan penelitian paling

sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) SKS yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan; dan

2. Beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain;

Sesuai dengan definisi dosen menurut PP 37 Tahun 2009 (Pasal 1 ayat 1), bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sehingga untuk menjalankan profesinya, dosen harus melakukan ketiga dharma tadi dengan seimbang, dan ini harus disadari juga diimplementasikan oleh pimpinan perguruan tinggi yang mengelola dosen-dosen PNS-DPK tersebut.

Kepala lembaga Prof. Dr. Uman Suherman menyatakan bahwa, LLDIKTI Wilayah IV yang memiliki fungsi Pembinaan-Pengawasan –Pengendalian (BINWASDAL) sudah tentu menyusun berbagai upaya dan strategi untuk meningkatkan kinerja dosen PNS-DPK ini, diantaranya menyelenggarakan workshop, seminar, kerjasama, pendampingan, bimbingan teknis yang tujuannya adalah :

1. Meningkatkan profesionalisme dosen dalam melaksanakan tugas,
2. Meningkatkan proses dan hasil pendidikan
3. Menilai akuntabilitas kinerja dosen di perguruan tinggi
4. Meningkatkan atmosfer akademik di semua jenjang perguruan tinggi

5. Mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional

Semua program dan kegiatan tersebut, untuk kemudian apabila telah selesai dilaksanakan, maka akan dievaluasi secara terprogram juga. Adapun prinsip-prinsip evaluasi yang dicanangkan prof. Dr. Uman Suherman diantaranya adalah :

1. Berbasis evaluasi diri
2. Saling asah, asih dan asuh
3. Meningkatkan profesionalisme dosen
4. Meningkatkan atmosfer akademik
5. Mendorong kemandirian perguruan tinggi

Evaluasi ini dilaksanakan secara periodik artinya evaluasi dilakukan pada setiap kurun waktu yang tetap, biasanya tiap akhir semester dan tiap akhir tahun. Hal ini untuk menjaga akuntabilitas LLDIKTI Wilayah 4 kepada pemangku kepentingan dan semua ini dilakukan secara *online*. Kegiatan Evaluasi ini dimulai oleh dosen dengan membuat evaluasi diri terkait semua kegiatan yang dilaksanakan baik pada bidang (1) pendidikan dan pengajaran, (2) penelitian dan pengembangan karya ilmiah, (3) pengabdian kepada masyarakat maupun (4) kegiatan penunjang lainnya, dalam bentuk Laporan Kerja Dosen (LKD). Selanjutnya LKD disusun berdasarkan kontrak kerja dosen yang dilakukan diawal semester, disetujui oleh Ketua Program Studi/Dekan. Setelah itu otomatis, sistem akan menyerahkan kontrak dosen tersebut ke asesor. Di akhir semester, asesor menilai LKD yang didukung oleh buktinya untuk dinilai dan diverifikasi. Adapun syarat menjadi asesor dan tatacara penilaian adalah sebagai berikut. Dosen yang masih aktif

1. Mempunyai NIRA (Nomor identifikasi registrasi asesor)
2. Telah mengikuti sosialisasi penilaian kinerja dosen

3. Ditugaskan oleh pemimpin perguruan tinggi
4. Dihindari terjadinya konflik kepentingan
5. Satu atau semuanya dapat berasal dari perguruan tinggi sendiri ataupun dari perguruan tinggi lain
6. Mempunyai rumpun atau sub rumpun ilmu yang sesuai dengan dosen yang dinilai
7. Mempunyai kualifikasi jabatan fungsional dan atau tingkat pendidikan yang sama atau lebih tinggi dari dosen yang dinilai.
8. Pemimpin perguruan tinggi mengatur agar

asesor tidak menilai kinerja sendiri atau bertukar ganti asesor-dosen (A sebagai asesor menilai B sebagai dosen kemudian B sebagai asesor menilai A sebagai dosen) Demikian, kepala LLDIKTI wilayah IV, berharap dengan lancarnya kenaikan pangkat dan jabatan akademik para dosen PNS-DPK berarti akan membantu untuk meningkatkan kualitas dan *performance* perguruan tinggi tersebut.

PROFIL AKREDITASI PERGURUAN TINGGI DAN PROGRAM STUDI LLDIKTI WILAYAH IV



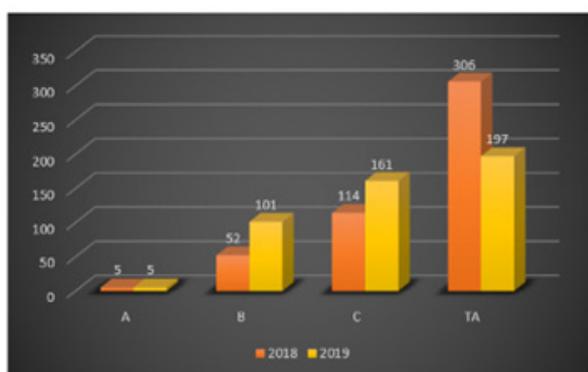
Akreditasi merupakan sebuah *performance* kepercayaan dari pemerintah dan masyarakat terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi. Di samping itu terdapat ketentuan

bahwa, menjadi kewajiban dari penyelenggara perguruan tinggi di Indonesia, untuk menjaga kualitas lembaganya dan sekaligus sebagai hak PTS untuk menerbitkan ijazah untuk lulusannya secara sah, semua perguruan tinggi harus terakreditasi. Namun pada realitasnya kondisi akreditasi ini belum terlalu menggembirakan di lingkungan LLDIKTI Wilayah IV provinsi Jawa Barat dan Banten. Ada 2 (dua) kelompok akreditasi, yaitu akreditasi perguruan tinggi secara menyeluruh dan akreditasi program studi. Gambaran akreditasi perguruan tinggi pada tahun yang lalu, dari 464 perguruan tinggi dan ditambah perguruan tinggi baru yaitu, Politeknik Bhakti Kartini, sehingga tahun 2020 ini berjumlah 465 PTS adalah : Akreditasi “A” 5 PTS atau 1,08%; Akreditasi “B” 101 PTS atau 21,73%; Akreditasi “C” 161 PTS atau 34,63%; Tanpa Akreditasi 197 PTS atau 42,36%.

Walaupun data tersebut tidak terlalu menggembirakan, namun grafik di bawah membandingkan ada kenaikan yang signifikan

jumlah akreditasi tahun 2018 dengan tahun 2019. Analisisnya adalah untuk perguruan tinggi yang semula akreditasi “B” dan “C” meningkat cukup signifikan, karena mereka berasal dari PTS yang semula tidak terakreditasi yaitu dari 306 menjadi “tinggal” 197 lagi. Walaupun yang akreditasi “A” tetap 5 perguruan tinggi yaitu, Universitas Telkom, Unisba, Unpar, Unpas, Universitas Presiden. Tahun 2019 bertambah dengan Itenas dan jika dijumlahkan dengan PTN maka ada 17 Perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki akreditasi “A”. Berikut digambarkan grafik perkembangan status akreditasi perguruan tinggi di LLDIKTI Wilayah IV.

Selanjutnya, digambarkan rincian akreditasi perguruan tinggi dalam tabel berikut.



Grafik 6. Perbandingan akreditasi PTS di LLDIKTI Wilayah IV tahun 2018 dan tahun 2019.

AKREDITASI PTS DI LINGKUNGAN LLDIKTI WILAYAH IV TAHUN 2020

Bentuk	Akreditasi			Tidak Terakreditasi
	A	B	C	
Universitas	5	34	15	17
Institut	0	5	1	5
Sekolah Tinggi	0	47	99	94
Akademi	0	6	38	59
Politeknik	0	8	13	14

Akademi Komunitas	0	0	0	5
Jumlah	5	100	166	194
465				

Selain itu, dalam Akreditasi berdasarkan Program Studi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah IV Tahun 2020, kondisinya hampir sama dengan akreditasi lembaga perguruan tingginya, yang juga tidak terlalu menggembirakan. Dari 2332 program studi hanya 131 prodi atau 5,62% yang memiliki akreditasi “A”. Adapun program studi yang memiliki akreditasi “B” sebanyak 1109 atau 47,56%; akreditasi “C” sebanyak 718 prodi atau 30,79% dan tidak terakreditasi 374 prodi atau 16,04% saja.

Status akreditasi perguruan tinggi ini sangat menentukan seorang calon mahasiswa memilih kuliahnya, karena dikaitkan dengan kualitas penyelenggaraan perguruan tinggi, yang diukur dengan standar kriteria yang berubah dari waktu ke waktu. Demikian pula LLDIKTI wilayah IV yang terus menerus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan akreditasi PTS, baik dalam level lembaga perguruan tinggi maupun level program studi. Upaya ini dilakukan melalui workshop, bimtek, konsultasi, pendampingan atau berbagai forum pertemuan lainnya yang bertujuan memperbaiki *performance* status akreditasi di wilayah binaannya, yaitu Jabar dan Banten. (ARS)

KEMITRAAN DENGAN DUNIA INDUSTRI



Kepala LLDikti 4 beserta para Pimpinan PTS dalam acara Penandatanganan Kerjasama antara PTS dan Dirjen Dukcapil

Menurut Kepala Kepala LLDIKTI (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi) Wilayah IV Jawa Barat dan Banten yang harus menjadi perhatian ke depan dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi adalah kemitraan dengan dunia industri dan dunia usaha, karena kebijakan yang diberlakukan sekarang adalah lebih menitik beratkan daya serap lulusan. Kata inti pendidikannya tidak cukup hanya *output* tetapi *outcome*. Kalau *output* bicara berapa banyak yang diluluskan, kalau *outcome* berapa persen kesuksesan lulusan. Salah satu pendukung untuk kelulusan itu adalah kemitraan dengan dunia industri, terutama berkaitan dengan aspek pertama penyusunan

kurikulum, yang kedua pelaksanaan praktik kerja, ketiga praktik kerja dengan sertifikasi kompetensi yang harus diupayakan dan keempat daya serap lulusan. Hal tersebut menjadi perbincangan dengan status kampus merdeka, merdeka belajar.

Di antara itu yang sangat penting dalam suatu kemitraan apakah mau dibahas semua, termasuk kebebasan membuka program studi, namun yang sangat penting membangun budaya mutu, sehingga pada saat akreditasi bukan lagi momok yang menakutkan. Jangan sampai muncul sebuah istilah di kampus tidak usah akreditasi. Padahal dalam pandangan Prof. Uman akreditasi, itu adalah penilaian eksternal terhadap sistem penjaminan

mutu yang ada di suatu perguruan tinggi. Yang perlu dikembangkan terlebih dahulu bukan kepedulian dan keharusan akreditasi tetapi budaya mutu, dan mutu hanya bisa dilihat dan dinilai melalui akreditasi. Kalaupun akreditasi tidak ada, kalau

menjadi ketentuan Kementerian, LLDIKTI Wilayah IV sudah mengikuti kebijakan kementerian. Sudah disampaikan ke Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa kampus-kampus di LLDIKTI Wilayah IV mendahului



Dirjen Dukcapil Kemendagri (kiri) bersama Kepala Lldikti Wilayah IV

mutu sudah yakin dan keyakinan itu tidak cukup hanya secara internal.

Berkaitan kesiapan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) dalam pelaksanaan jargon “kampus merdeka, merdeka belajar”, menurut Prof. Uman Langkah awal yang mendahului dikampus di LLDIKTI yang lain adalah LLDIKTI Wilayah IV melakukan kegiatan rapat koordinasi dan *benchmarking* membawa kampus perguruan tinggi swasta ke Universitas Pamulang dan penandatanganan perjanjian kinerja serta penandatanganan MOU Dirjen dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Walaupun belum

dan mendapatkan informasi tentang 4 (empat) kebijakan Kemdikbud, Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dan Permendikbud Nomor 7 Tahun tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Melakukan MOU dengan Dirjen Dukcapil menurut Prof. Uman dimaksudkan untuk mempermudah penomoran ijazah karena tahun 2020 semua perguruan tinggi harus menggunakan

penomoran ijazah nasional. Penomoran ijazah nasional *database* nya adalah nomor induk kependudukan mahasiswa. Kalau tidak kerja sama dengan Disdukcapil maka setiap operator otomatis akan meng-*entry* nomor KTP masing-masing. Dengan cara kerjasama maka perguruan tinggi bisa langsung menggunakan data yang sudah ada di disdukcapil. Tinggal tindak lanjut yang dilakukan, LLDIKTI tinggal mengirimkan orang Dirjen dukcapil yang menyelenggarakan bimbingan teknis itu. Kalau kita yang menyelenggarakan akan dicari jalan di mana supaya cepat, disamping LLDIKTI perlu mempertegas kembali pertemuan dengan kampus terutama yang menuntut tataran teknis.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah sosialisasi, kemudian mengundang kampus-kampus satu rumpun terutama kampus yang menyangkut vokasi karena bagaimana pun program studi perlu diarahkan pada penyusunan kurikulum, dan *review* kurikulum. Kesiapan kampus untuk memenuhi hak mahasiswa, yaitu

- 1). pada saat orang memilih kampus tertentu,
- 2). pada saat mahasiswa mau memilih kampus orang lain, Hal ini sama beratnya. Prodi itu perlu berpikir ketika mendapatkan akreditasi A harus ke prodi mana untuk menambah kompetensi yang dia punya. Katakan orang di manajemen, dia mau wirausaha bukan harus ke akuntansi tetapi dia ke prodi hukum supaya tahu peraturan perusahaan atau ke psikologi, kalau mau mengembangkan perusahaan dia harus ke informatika dalam membentuk jejaring ke informatika. Pemilihan prodi sudah harus dipetakan. Begitu juga pada saat kita menyediakan mata kuliah untuk pilihan untuk orang lain. Pertimbangannya satu kompetensi apa yang bisa diberikan, yang kedua mata kuliah apa dan ketiga dosen terbaik yang perlu disajikan.

Jangan sampai diberikan dosen yang tidak jelas kompetensinya.

Tentang pembukaan prodi baru ada 2 hal yang secara jelas adalah kemitraan dengan *user* dan kemitraan dengan kampus pembina. Untuk pengajuan yang belum diproses dibuka sampai tanggal 24 Maret 2020. Mengenai jabatan akademik untuk Asisten Ahli harus ada Sinta 3 sampai 6, sedangkan kampus itu tidak semuanya besar seperti Unisba, banyak kampus belum punya jurnal yang terakreditasi, makanya untuk jabatan asisten ahli tidak perlu ada karya jurnal terakreditasi yang penting ada karya ilmiah yang diterbitkan. Permendikbud tentang “Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka” itu tidak mengikat seluruh kampus, tetapi memberikan peluang pada seluruh kampus untuk maju secara bersama sama.

Menurut Prof. Uman kebijakan ini menyangkut perlindungan masyarakat untuk mendapatkan kampus yang bagus. Jadi bukan akreditasi saja, akreditasi bukan menjadi kegiatan yang menghantui. Kampus sekarang diberikan pilihan, pada saat suatu perguruan sudah cukup mendapatkan akreditasi yang sampai seumur hidup. Akreditasi 5 tahun akan diperbaharui, menurut peraturan BAN yang baru sebelum diperbaharui BAN PT akan ada peninjauan. Tetapi BAN PT tidak meninjau secara langsung, akan melihat dari pangkalan data. Atau ada aduan dari masyarakat kampus ini sudah tidak layak lagi sebagai kampus. Maka status akreditasinya bisa dicabut. Selama posisi tidak ada masalah akan diperpanjang. Bahkan sekarang akreditasi tidak akan melakukan visitasi, kalau sudah memiliki angka kecukupan untuk akreditasi, tidak ada sesuatu yang memberatkan langsung status akreditasi. Jadi sekarang *desk evaluation* betul -

betul akan menghasilkan akreditasi, kecuali pada saat di angka kecukupannya belum ada maka visitasi baru dilakukan. Kalau sekarang semuanya visitasi, itu yang memberatkan BAN PT karena dana tidak cukup. Pada saat program studi baru dibuka mendapatkan akreditasi C, boleh mengajukan peningkatan setelah 2 (dua) tahun. Kalau dulu bukan boleh tetapi harus. Pemahaman kebijakan yang perlu ditindak lanjuti oleh LLDIKTI. Contoh dulu yang namanya S1 membuka S1 Menerima mahasiswa 0 tahun dan tidak boleh menerima mahasiswa *transfer*. Karena takutnya itu pada saat mahasiswa *transfer* selesai tidak bisa yudisium karena belum akreditasi. Sekarang begitu program studi baru dibuka sudah punya akreditasi. Artinya boleh menerima lanjutan. Ini belum dipahami oleh semua pimpinan perguruan tinggi. Tidak semua mahasiswa *transfer* bermasalah. Yang *transfer* itu tadinya D3 mau melanjutkan S1 dan pun perlu dipahami, D3 ke D4 tinggal melanjutkan karena itu linear, tetapi D3 ke S1 sah itu lain jalur. Maka

tidak bisa satu setengah tahun selesai. Kebanyakan di Perguruan Tinggi Swasta apalagi yang kecil tanpa melihat mutu pokoknya D3 satu tahun tahun wisuda. Ini sesuatu yang bagaimana mungkin bisa terjadi. Sekarang *Home University* memberikan keuntungan ditempuh 6 bulan sampai 12 bulan, biayanya hanya 12 juta dan tidak perlu ke kampus. Pas ditinjau ke lokasi kampus hanya ruangan yang kecil yang tidak memenuhi standar. Ternyata itu tempat kursus. Kursus mata kuliah yang dibuat dalam bentuk *file* dimasukkan ke *flasdisk*, setiap yang daftar *file* atau *flasdisk*. Ijazahnya tidak berlaku untuk bekerja. Kalau mau bekerja nanti ijazahnya akan *ditransfer* ke universitas yang lain. Kalau di lapangan terjadi pelanggaran Kepala Lembaga Pendidikan Tinggi akan memberikan peringatan, demikian Prof. Uman menegaskan. (ANS)

LULUSAN PERGURUAN TINGGI TIDAK HARUS MENJADI PEKERJA

Pendidikan Tinggi dihadapkan pada tanggung jawab dan *trust*, yang sangat kuat. Pertama, *trust* yang paling kuat itu adalah *trust* masyarakat dan kedua *trust* pemerintah. Perguruan tinggi sering terbebani dengan *trust* pemerintah. kewajiban akreditasi dianggap sebagai beban, sehingga perguruan tinggi ke akreditasi. Padahal sebuah perguruan tinggi yang paling pokok itu melayani masyarakat, kita bagian

dari masyarakat, anak didik kita adalah titipan masyarakat, yang akan kembali masyarakat, jadi *trust* yang utama itu adalah melayani masyarakat ujar Prof. Uman, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV ketika menyampaikan sambutan dalam acara silaturahmi dengan Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Bandung di kampus Stikom Bandung, 17 Februari yang lalu, bisa

dilihat bagaimana dengan lulusannya.

Tentang kampus yang bagus menurut Prof. Uman, bisa dilihat bagaimana dengan lulusannya. Lulusan itu itu harus paham dunia kerja, paham pekerjaan yang dilakukan dan paham peluang membuka pekerjaan. Jadi lulusan perguruan tidak serta merta harus jadi pekerja. Kalau hanya mencari pekerjaan peluang dan mendapatkan rezeki hanya satu, sementara kalau kita berpikir menciptakan pekerjaan, kesempatan mendapatkan pekerjaan sembilan kali, ujar Prof. Uman.

Apakah STIKOM bisa mengantarkan mahasiswanya menjadi orang-orang yg sukses? atau mahasiswanya bekerja dengan mudah? Apakah Stikom ini mengantarkan lulusan - lulusan untuk menciptakan lapangan pekerjaan buat lingkungan sekitarnya. STIKOM harus mempunyai keunggulan yang berbeda dengan perguruan lain, bahkan memberikan kesuksesan untuk lulusannya, katanya. Kesadaran yang harus dibangun sebelum mendidik mahasiswa adalah pertama sadari bahwa mahasiswa apa adanya, kedua bangun sebuah kebanggaan, karena jaminan masa depan mau tidak mau pengenalan kampus itu harus diungkapkan menerima mahasiswa sebagai orang terbaik.

Seorang dosen adalah ujung tombak yang menentukan keberhasilan seorang mahasiswa dalam studi, namun jadi seorang dosen tidak harus pintar, yang paling penting dalam penampilannya dosen harus menunjukkan sosok yang pintar. Selain itu juga menjadi dosen jangan menunjukkan kebodohan dihadapan mahasiswa karena kredibilitas dia diuji dihadapan mahasiswa.

Mengapa standar nasional pendidikan nasional perlu dirujuk? pertama standar

kompetensi, karena tidak mungkin daya serap tanpa kompetensi, yang bisa membangun kompetensi adalah kurikulum. Makanya pada saat Menteri menyampaikan kebijakan “kampus merdeka, merdeka belajar”, standar nasional tetap menjadi acuan kaitannya kompetensi. Bagi perguruan tinggi yang mencapai akreditasi perguruan tingginya B bebas membuka program studi baru, tanpa harus meminta rekomendasi ke kepala LLDIKTI. Kurikulum itu harus dibangun berdasarkan mitra kerja, karena kurikulum disusun bukan hanya orang kampus tetapi Stikom sebagai bagian dari masyarakat, kurikulum harus memiliki relevansi dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Kedua dengan dunia industri, ketiga dengan dunia usaha. Kompetensi itu dengan perkuliahan, dibangun dengan praktikum, dibangun dengan penilaian yang benar.

Kalau mahasiswa kita magang dengan dunia usaha dan dunia industri mampu memberikan sertifikat kompetensi maka, tidak menutup kemungkinan sebelum mahasiswa wisuda, sebelum yudisium sudah dicatat sebagai calon pegawai di dunia industri atau di dunia usaha.

Jadi mitra kerja sekarang MOU tidak cukup kerja sama untuk mendatangkan mahasiswa, tetapi kerja sama untuk menyerap lulusan perguruan tinggi. MOU perguruan dilakukan pusat, tetapi pelaksanaannya seluruh civitas akademika. Makanya disitu bebas membuka program studi tetapi menunjukkan kemitraan dengan lembaga dunia industri dan lembaga dunia usaha. Tidak sedikit MOU (*Memorandum Of Understanding*) kemitraan dengan kampus yang sudah lebih bagus dari pada perguruan sendiri. Mengadakan MOU dengan

perguruan tinggi pembina yang jauh lebih bagus diharapkan perguruan tinggi yang dibina lebih bagus dari pada perguruan tinggi yang membina.

Dalam pandangan Kepala LLDIKTI, kampus yang sempurna bukanlah kampus terbaik tetapi kampus yang memiliki program studi yang lengkap. Prodi yang lengkap dan bagus bukan program studi yang segalanya ada, melainkan program studi yang berjenjang, jenjang Sarjana (S1), pasca sarjana (S2) dan dokter (S3) lengkap semuanya ada. Untuk mendirikan program jenjang doktor (S3) makanya dosen harus pendidikan (S3) dan mempunyai guru besar atau profesor. Perguruan tinggi sudah lengkap ketiga membutuhkan tenaga dosen dapat memanfaatkan yang ada.

Di Indonesia tidak ada Perguruan tinggi yang memiliki kelengkapan jumlah program studi dan jenjang studi. Alangkah baiknya Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Bandung memiliki lebih dari 1 (satu) Program Studi Ilmu Komunikasi melengkapi jenjang studi membuka jenjang studi Pasca sarjana (S2) dan jenjang studi doktor (S3) supaya disebut memiliki program studi yang lengkap.

Tentang akreditasi saat ini bukan lagi wajib tetapi dibolehkan. Pada saat izin program studi keluar sudah otomatis C. Bukan lagi seperti dulu, begitu izin program studi keluar status terakreditasi minimum, itu bukan akreditasi, itu memenuhi syarat untuk mengajukan akreditasi setelah 2 (dua) tahun berjalan. Sebagai dosen profesional. Setelah dua tahun berjalan yayasan sudah punya dosen tetap diajukan NIDN, setelah NIDN diperoleh dua tahun kemudian mengajukan jabatan akademik dosen. Maka pada saat pengajuan akreditasi pertama itu dosen-dosen tidak hanya tenaga pengajar, tetapi

sudah punya jabatan akademik dosen minimal asisten ahli. Setelah mendapatkan jabatan asisten ahli dua minggu kemudian lakukan inpassing. Setelah inpassing data *eligible* linier dengan yang mata kuliah yang diampuh maka besar kemungkinan dipanggil ikut sertifikasi dosen. Kalau sertifikasi dosen lulus perguruan tinggi punya keunggulan dosen yaitu punya jabatan dosen, kedua sudah punya sertifikat sebagai pendidik profesional. Pada saat mengajukan akreditasi telah memiliki dosen yang tidak minimalis, ujar Prof. Uman.

Prof. Uman Suherman menyarankan Ketua Yayasan dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Bandung agar membangun kerja sama dengan dunia industri dan dunia usaha serta mengembangkan jumlah program studi yang ada jangan hanya terpaku pada 1 (satu) program studi. Dengan penambahan jumlah program studi setidaknya akan membantu subsidi silang terhadap program studi yang satu terhadap yang lain. Juga harus menjadi perhatian yayasan dan ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi untuk mendorong dosen tetap studi lanjut ke jenjang Doktor (S3). (ANS)***

KIPRAH UNIVERSITAS ISLAM UNISBA DI MASA PANDEMIC COVID 19

Pandemi virus Covid 19 yang melanda dunia telah banyak mengubah sistem kehidupan manusia, seperti sistem sosial, sistem ekonomi, termasuk sistem Pendidikan. Universitas Islam Bandung (Unisba) dalam situasi darurat virus seperti saat ini juga mengalami perubahan dalam sistem akademiknya. Sejak adanya surat edaran Menteri Pendidikan Kebudayaan tentang pencegahan virus covid 19 pada satuan Pendidikan di bulan Maret, beberapa universitas di Indonesia seperti Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada dan beberapa universitas lainnya segera merespons dengan membuat kebijakan belajar dari rumah melalui fasilitas daring. Demikian pula dengan Universitas Islam Bandung melalui surat edaran Rektor Unisba segera merespons untuk menerapkan proses belajar melalui fasilitas daring. Bahkan surat edaran sudah diperbaharui sebanyak tiga kali untuk mengantisipasi situasi pandemic yang kasusnya terus bertambah. Surat edaran rektor tersebut dibuat sebagai upaya pencegahan penyebaran infeksi COVID-19 di lingkungan Unisba, Untuk meringankan beban kuota mahasiswa, Unisba memberi *free* kuota internet bagi mahasiswanya. Layanan khusus Informasi dan *Hotline* Penanganan Virus Corona di Unisba juga disediakan unisba untuk membantu masyarakat memperoleh informasi dan penanganan virus Corona. Selain itu, Unisba juga peduli kepada masyarakat sekitar kampus yang membutuhkan bantuan kesehatan khususnya Tamansari Bandung

dengan tetap membuka layanan UPT Kesehatan (Klinik).

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia juga melakukan langkah strategis dengan melakukan teleconference bersama Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Tinggi Kemendikbud, Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D. serta 15 perguruan tinggi se-Indonesia yang salah satunya Unisba, untuk berdiskusi terkait penanganan masing - masing perguruan tinggi dalam mengantisipasi penyebaran virus tersebut. Pada kesempatan tersebut Rektor Unisba, Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H., menyatakan, sebelum pemerintah mengumumkan dua orang WNI positif terjangkit virus corona, Unisba sudah menyebarkan surat edaran kepada civitas akademika berupa kewaspadaan dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya penularan, serta menghindari kontak perorangan. Surat edaran berisi aturan melaksanakan perkuliahan, ujian yang semuanya dilakukan melalui *platform* e-kuliah yang dimiliki unisba. Selain itu, Unisba juga menanggihkan kunjungan ke luar negeri atau mendatangkan tamu dari luar negeri selama kurun waktu tertentu.

Unisba juga terlibat dalam forum Satgas Covid 19 Jawa Barat dan mendapat penugasan dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, bersama 10 pimpinan Perguruan Tinggi di Jawa Barat menyelenggarakan Rapat Sinergitas Penanganan Covid-19 melalui *Video Conference*. Selain

Universitas Islam Bandung (Unisba) terdapat Sembilan universitas lainnya yaitu Universitas lainnya antara lain ITB, Unpad, UI, IPB, Maranatha, Unpar, Unpas, Tel-U, dan Itenas tergabung dalam forum Satgas Covid-19 Jawa Barat dan mendapatkan penugasan khusus terkait bidang keilmuannya masing-masing. Pada kesempatan tersebut Gubernur Jawa Barat berharap, Unisba menjadi salah satu institusi yang berada di garda terdepan

kampus Unisba dengan membuat *hand sanitizer* ini dilakukan oleh tim dari Prodi Farmasi Unisba yang terdiri dari kelompok dosen yang tergabung dalam Kelompok Bidang Keilmuan Teknologi Farmasi (Farmasetika). Tim ini diketuai oleh Sani Ega Priani, M.Si., Apt., dengan anggota tim terdiri dari Fitrianti Darusman, M.Si, Apt., Ratih Aryani, M.Farm., Apt., Mentari Lutfika Dewi, M.Farm., Apt., G.C. Eka Darma, M.Si., Apt., dan Aulia Fikri Hidayat, M.Si.,



Foto : www.unisba.ac.id

dalam bidang dakwah terutama dalam memberikan pandangan-pandangan keagamaan terkait wabah, fiqih mengenai tarawih di rumah, fatwa shalat Idul Fitri saat wabah, penanganan zakat, dan isu keumatan lainnya hingga dapat menjadi penyejuk bagi umat di tengah pandemik Covid-19.

Ketersediaan cairan antiseptik (*hand sanitizer*) yang terbatas dan mahal dipasaran mendorong Prodi Farmasi UNISBA sebagai prodi yang berkaitan dengan kesehatan dan produksi sediaan farmasi, berperan serta membantu menyelesaikan masalah tersebut, terutama dikalangan internal

serta dibantu oleh dua orang alumni yaitu Indri Widayati, S.Farm. dan Azhariyanti Putri Santika, S. Farm. Sementara itu Unit Bisnis Farmasi dibawah Lembaga Inkubator Bisnis Produk Halal Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Unisba dan Kebun Quran, bekerja sama menciptakan inovasi *hand sanitizer* berbahan herbal non alcohol dari ekstrak daun bidara (*Ziziphus spinachristi L.*) yang halal dan efektif membunuh kuman, serta mencegah infeksi virus terutama COVID -19. Tim inovasi ini diketuai Ketua Inkubator Bisnis Produk Halal LPPM Unisba yang juga tim pembuat

handz sanitizer, Fitrianti Darusman, M.Si., Apt.

Masalah kurangnya Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis juga menjadi perhatian unisba. Melalui penelitian yang dilakukan tim dosen Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung (FKUNISBA), menginisiasi pengembangan sebuah instalasi berupa

Menggunakan material yang mudah didapat, dapat digunakan dalam jangka waktu panjang serta dapat dikembangkan secara luas di seluruh fasilitas kesehatan. Instalasi partisi ruang aman ini diserahkan secara simbolis melalui aplikasi *video conference zoom* oleh Rektor Unisba, Prof. Dr. H.

Edi Setiadi, S.H., M.H. kepada Direktur Rumah Sakit Al Islam (RSAI) Bandung Muhammad Iqbal, dr., Sp.Pd., dan disaksikan oleh jajaran pimpinan di tingkat Universitas dan Fakultas, Melalui ketersediaan dan pemasangan instalasi partisi ruang aman ini di RSAI Bandung diharapkan keselamatan dan kenyamanan tenaga kesehatannya dapat lebih terjamin sehingga



Kominpro Unisba

Foto : www.unisba.ac.id

partisi ruang aman untuk pengambilan spesimen pemeriksaan COVID-19 yang kemudian diberi nama KOPID\$hield. Pengembangan KOPID *Shield* ini, sejalan dengan keunggulan FK UNISBA di bidang Kesehatan Industri. KOPID *Shield* ini dibuat sebagai salah satu fasilitas untuk pengambilan Spesimen Covid-19 dengan tingkat keamanan yang memenuhi standar mencakup keselamatan biologi (*biosafety*), dapat mencegah transmisi infeksi, ergonomis (disain yang nyaman/baik).

mereka dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Tim penggagas pengembangan desain instalasi partisi ini diketuai Dr. Maya Tejasari dr., MKes., dengan anggota tim yang terdiri dari Dr. Yani Triyani dr., SpPK., MKes , Dr. Titik Respati, drg., MScPH, Dr. Lelly Yuniarti, S.Si.,M.Kes, dan Dr. Wida Purbaningsih dr., MKes. Tim inventor peneliti ini bekerjasama dengan konsultan ahli teknik Ir. Hikmat Alitamsar, MM yang berpengalaman dalam bidang desain dan pembuatan fasilitas kesehatan yang memenuhi standar keselamatan biologi (*biosafety*).

(Sumber: Kominpro Unisba)



Pandemi Virus Corona (Covid 19) : Unikom menerapkan Work From Home (WFH)

Pandemi Virus Corona (Covid-19) sebagai kejadian luar biasa *Force Majeur* terkait perkembangan penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Indonesia, khususnya Jawa Barat, pemerintah pun senantiasa menghimbau masyarakat terkait upaya pencegahan penyebaran Virus Corona (Covid-19). Penerapan peraturan pemerintah demi mencegah penyebaran Virus Corona (Covid-19) dilakukan salah satunya melalui *workfromhome* (WFH) atau bekerja di rumah bahkan lebih lanjut pemerintah di lingkungan Bandung Raya mulai tanggal 23 April 2020 menerapkan kegiatan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), adalah istilah kekarantinaan kesehatan di Indonesia

yang didefinisikan sebagai “Pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Unikom, sebagai lembaga pendidikan tinggi senantiasa menghormati dan mendukung untuk waspada dan berkomitmen tinggi menghadapi mewabahnya virus tersebut. Sebagai bentuk kewaspadaan terhadap Covid-19, Unikom melakukan *Study From Home* (SFH) serta *Work From Home* (WFH) bagi sivitas akademika Unikom. Berbagai langkah terus diupayakan salah satunya dengan keputusan Rektor Unikom mengenai

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)/ Perkuliahan yang dilaksanakan secara *Online/ E-learning* atau Kuliah Jarak jauh/Daring.

Sejalan dengan hal tersebut Rektor Unikom Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, M.T., mengeluarkan surat edaran pertama pada 16 Maret 2020 dengan nomor 7309/SR/REKTOR/UNIKOM/III/2020 yang berisikan:

1. *The 3rd International Conference on Informatics, Engineering, Sciences & Technology (INCITEST)* yang sedianya dilaksanakan pada hari Kamis, 2 April 2020 ditunda pelaksanaannya menjadi hari Kamis, 11 Juni 2020.
2. Wisuda Semester Ganjil tahun akademik 2019/2020 yang sedianya dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 ditunda pelaksanaannya menjadi hari Sabtu dan Minggu tanggal 26-27 September 2020 kecuali bila keadaan Tidak Memburuk dan Memungkinkan maka akan dilaksanakan sesuai jadwal semula.
3. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)/ Perkuliahan dilaksanakan secara *Online/ e-learning* atau Kuliah Jarak jauh/Daring seperti yang telah diterapkan dilingkungan Unikom sejak tahun 2000 hanya saat ini berlaku Total untuk seluruh aktivitas KBM terhitung sejak keputusan ini hingga akhir Maret 2020.
4. Proses KBM dilaksanakan dengan memanfaatkan fasilitas *Learning Management System (LMS)* Unikom dan fasilitas pendukung yang telah disiapkan Direktorat PTSI Unikom.
5. Dosen dan Mahasiswa Wajib Melaksanakan perkuliahan *online* sesuai jadwal kuliah serta mencatatkan kehadirannya secara *online*.
6. Perwalian *online* dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan tidak ada perpanjangan

kembali.

7. Proses bimbingan Tesis, Skripsi dan Tugas Akhir dilaksanakan secara *online*.
8. Menunda/ mengalihkan semua aktivitas yang melibatkan banyak orang dari dalam/luar Unikom baik *Studium Generale* atau kegiatan kemahasiswaan dalam kurun waktu tersebut hingga situasi yang memungkinkan.
9. Dosen, Karyawan dan Mahasiswa Unikom agar memperhatikan kesehatan diri dengan mengikuti perkembangan dan standar kesehatan yang ditetapkan WHO terkait Virus Corona tersebut serta selalu memeriksakan kesehatannya pada *Medical Center* Unikom.
10. Link-link berikut dapat digunakan untuk KBM Unikom: Media Daring (<http://lms.unikom.ac.id>) : Katalog (<http://openlib.unikom.ac.id>) : Ebooks (<https://taylorfrancis.com> atau <http://cambridge.org/care>) ; Ejournal (<http://tandfonline.com> atau <http://e-resources.perpusnas.go.id>) ; Konten Lokal (<http://elib.unikom.ac.id> atau <http://elibrary.unikom.ac.id> atau <http://onsearch.id> atau <http://rama.ristekbrin.go.id>) ; Student Admisi (admisi@email.unikom.ac.id).
11. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan disesuaikan dengan perkembangan kasus *Corona Virus Disease (Covid-19)* tersebut baik skala Regional, Nasional dan Internasional serta disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah. Dukungan dan kepedulian Unikom pada himbauan Pemerintah tentang waspada, pencegahan dan penyebaran Virus Corona, tampak tenang, bijak dan serius ditanggapi dan diputuskan oleh Rektor Unikom dan Jajaran Pimpinannya di Lingkungan Universitas Komputer Indonesia. Segala upaya

maksimal dalam menjalankan WFH tersebut tentunya telah dilakukan oleh Rektor Unikom melalui regulasi yang ditetapkan. Meskipun saat ini seluruh sivitas akademika Unikom tengah melakukan WFH, namun Rektor Unikom dan seluruh jajaran Pimpinan Unikom akan selalu bersinergi aktif dalam mengupayakan perkembangan Unikom, sedangkan dosen dan karyawan tetap produktif dalam melakukan proses bekerja demikian juga aktifitas kantor lainnya, melalui fasilitas aplikasi online yang telah disediakan, misalnya semua bidang kerja di Lingkungan unikom, melakukan rapat melalui daring guna melakukan evaluasi dan capaian pekerjaan dan demi terciptanya kerjasama yang maksimal. Sehingga Unikom tetap Optimis dan berpikir positif, Meskipun saat ini dilakukan *Work From Home* (WFH), Capaian dan target Kerja di lingkungan Civitas akademika Unikom berjalan

sesuai target yang telah direncanakan serta didukung oleh sikap inovatif, kreatif dan produktif.

Pandemi Virus Corona (Covid-19) mendorong manusia untuk menjaga jarak fisik dan sosial antar individu, dimana jika memperhatikan kejadian *Force Majeur* terkait perkembangan penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Dunia dan khususnya di Indonesia pemerintah pun senantiasa menghimbau masyarakat terkait upaya pencegahan penyebaran Virus Corona (Covid-19), begitupun langkah Unikom memberlakukan WFH adalah langkah strategis sebagai upaya mendukung dan membantu pemerintah dalam memotong mata rantai penyebaran penyakit ini, yang telah banyak memakan korban. ^{**}(MSA)

Tips & Trik Upaya untuk Tetap Produktif Saat Work from Home

Kebijakan *work from home* (WFH) banyak menuai pro dan kontra terutama bagi para pekerja karena bagi sebagian bidang pekerjaan memang belum bisa dilakukan, apalagi dari kesiapan perusahaan belum tentu semua siap dengan sistem WFH ini. Rekomendasinya bagi para perusahaan dan bisnis bisa menggunakan beberapa aplikasi

untuk menunjang aktivitas *work from home* agar hasilnya maksimal.

Dilansir dari www.qwords.com, *work from home* adalah suatu istilah bekerja dari jarak jauh, lebih tepatnya bekerja dari rumah. Jadi pekerja tidak perlu datang ke kantor tatap muka dengan para

pekerja lainnya. *work from home* ini sudah tidak asing bagi para pekerja freelancer, namun istilahnya mereka lebih sering menyebutnya dengan kerja *remote* atau *remote working*. Meski sekilas terdengar menyenangkan, namun pada nyatanya *work from home* ini menyimpan kekurangan dimana salah satunya timbulnya penurunan produktivitas bekerja karena banyak gangguan dan kurangnya pengawasan. Maka, segala upaya harus diterapkan agar *work from home* ini dapat berjalan produktif dan sesuai dengan sebagaimana mestinya.

Dikutip dari www.cnnindonesia.com terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas saat *work from home*

yaitu:

1. Membuat jadwal

Work from home bukan berarti liburan atau berleha-leha di rumah, maka buatlah jadwal untuk bekerja dan taatilah jadwal tersebut. Misalnya bekerja mulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Pastikan Anda sudah siap untuk bekerja di waktu yang sudah ditetapkan dengan keadaan yang nyaman. Jangan mulai bekerja sebelum jadwal dan selesaikan pekerjaan tepat waktu, kecuali jika Anda mesti lembur dari rumah.

2. Beri jeda setiap 120 menit

Dilansir dari Inc bahwa studi menunjukkan memberi jeda pada pekerjaan dapat meningkatkan produktivitas. Beri jeda setiap 90-120 menit selama 10-15 menit maka jeda itu dapat dilakukan untuk istirahat sejenak, mencari udara segar, atau peregangan.

3. Matikan notifikasi

Saat bekerja, tingkatkan fokus dengan cara mematikan sejumlah notifikasi yang tidak penting seperti media sosial dan pemberitahuan sejumlah aplikasi. Gangguan sekecil apapun dari dering

handphone atau laptop dapat merusak suasana hati dan menghilangkan fokus.

4. Pilih lokasi yang nyaman

Pilihlah lokasi yang nyaman untuk bekerja seperti di ruang keluarga, ruang tamu, atau pekarangan rumah. Hindari bekerja di tempat tidur karena dapat merusak produktivitas. Siapkan pula barang-barang yang dapat meningkatkan suasana hati. Misalnya, foto keluarga, tanaman, hingga camilan.

Lebih lanjut, agar WFH dapat berjalan dengan optimal diperlukan kerja sama pimpinan maupun pegawainya, dimana bagi pimpinan agar senantiasa menegakkan regulasi yang disepakati dan mendengarkan aspirasi pegawai binaannya tersebut. Sedangkan bagi pegawai, harus dapat mengupayakan produktivitas guna menjaga kepercayaan pimpinan dalam menerapkan WFH. Selain itu, diperlukan kedisiplinan yang disertai profesionalisme, integritas yang kuat, responsif terhadap penugasan, serta antusias sehingga dapat meningkatkan kualitas pekerjaan.

Bangun Sinergitas Internal Unikom

Selama masa Work From Home (WFH) yang ditetapkan Unikom dalam menghadapi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), upaya maksimal dilakukan oleh setiap bidang kerja melalui rapat secara *online*. Secara beriringan, Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unikom Prof. Dr. Hj. Umi Narimawati, Dra., S.E., M.Si., menggelar koordinasi kerja bersama para jajaran pimpinan di setiap fakultas yang ada di Unikom.

Rapat yang digelar secara bergantian setiap harinya dimana diikuti oleh dekan, ketua program studi, ketua sidang skripsi dan tugas akhir, serta sekretariat program studi.

Agenda inti yang menjadi pembahasan dalam kegiatan tersebut ialah pembahasan mengenai penyamaan persepsi implementasi Program Skripsi dan UTS berbasis daring di Unikom. Mulai dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Fakultas Sastra, Fakultas

Desain, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Fakultas Pascasarjana, serta Fakultas Hukum yang turut berpartisipasi aktif mengikuti rapat daring tersebut. Adapun agenda lain dalam rapat tersebut ialah membahas mengenai evaluasi kinerja selama WFH serta penyusunan strategi yang dilakukan sebagai upaya pemaksimalan produktivitas bekerja.

SProf. Dr. Hj. Umi Narimawati, Dra., S.E., M.Si., menyampaikan “Terkait diskusi dengan organisasi mahasiswa Unikom, kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan menjadi sarana aspirasi, kritik, ataupun saran dari mahasiswa terkait Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) secara *online* yang dilakukan hingga saat ini. Bertolak dari aspirasi mahasiswa tersebut sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kebijakan yang akan disampaikan kepada Rektor

Unikom sebagai pimpinan utama.” ujarnya.

Lebih lanjut, terkait kondisi saat ini Umi berharap bahwa sinergitas dan kerjasama antar bidang semoga selalu diupayakan secara maksimal demi target yang dibuat sebelumnya dapat tercapai dengan baik. “Adapun khususnya bagi mahasiswa, perlu disampaikan bahwa Rektor Unikom dan seluruh jajaran pimpinan selalu berupaya maksimal dalam merumuskan sebuah kebijakan yang terbaik bagi seluruh sivitas akademika Unikom. Maka, kita harus saling bekerjasama satu dan lainnya, dimana jika kita saling bahu membahu akan terciptanya hasil yang baik. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa khususnya untuk COVID-19 ini.” tuturnya. (**MSA)

Diskusi Online: Upaya BEM Unikom dalam Analisis Gender dan Transformasi Sosial bagi Mahasiswa

Walaupun sedang diberlakukan *Work From Home* (WFH) tidak menyurutkan para penggiat kampus untuk melakukan kegiatan, seperti yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unikom melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan menjadi satu bentuk upaya pemanfaatan organisasi dalam mengimplementasikan ilmu dengan adanya kegiatan positif yang bertujuan untuk meningkatkan peranan perempuan guna kesadaran

sosial akan pentingnya seks dan gender. Menilik hal tersebut, melalui Diskusi *Online* pada Selasa, 21 April 2020 dimana bertepatan dengan Hari Kartini, kegiatan tersebut diikuti oleh sebanyak 96 peserta

baik perempuan maupun laki-laki.

Diselenggarakan secara *online* melalui *Group Whatsapp*, diskusi tersebut menghadirkan Vivi Tamia S.Sos., selaku salah satu kalangan aktivis dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kab. Bandung. Materi yang disampaikan dalam kesempatan tersebut yakni membahas mengenai Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Sebelum memasuki agenda inti, diskusi tersebut dipandu oleh Moderator sebagai pembuka acara yang sekaligus mengarahkan berjalannya acara, selanjutnya pemateri menyampaikan materinya melalui *Voice Note* atau berupa teks, dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dimana peserta dipersilahkan secara langsung

menyampaikan pertanyaan melalui chat.

Menteri Pemberdayaan Perempuan BEM Unikom, Alda Rezma Dwi Cantika menyampaikan “Tujuan diadakannya kegiatan ini tentu untuk lebih meningkatkan pengetahuan, ilmu, dan peranan sebagai kaum intelektual dalam berbagai aspek permasalahan serta persepsi keliru yang selama ini masyarakat ketahui mengenai Seks dan Gender. Dengan kajian ini, masyarakat atau mahasiswa jadi bisa lebih mengerti pemahaman dasar dari seks dan gender.” ujarnya.

Sementara itu, Presiden Mahasiswa BEM Unikom Archy Renaldy Pratama Nugraha berharap “Melalui kegiatan ini diharapkan para audiens

dapat memahami pentingnya pengetahuan tentang Analisis Gender dan Transformasi Sosial, ditambah memahami secara holistik peranan mahasiswa sebagai kaum intelektual dalam persoalan ditengah masyarakat yang saat ini masih terciptanya isu gender menjadi salahsatu faktor tantangan transformasi sosial termasuk memberikan gagasan stimulus seperti nilai, sikap-sikap sosial, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat atau proses di mana terjadi perubahan struktur dan fungsi suatu sistem sosial termasuk di era pandemik Covid-19.”



Foto : www.unikom.ac.id



LLDIKTI WILAYAH IV

FOLLOW US:



lldikti4



lldikti4



lldikti4

WWW.LLDIKTI4.OR.ID